

ABSTRAK

Nama : Naufal Fawaz Irhamulloh
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul : Ketersediaan Lahan untuk kawasan Pusat Pemerintahan Jawa Barat.
Pembimbing : Ir. Yanti Budiyantini M.Dev.Plg

Sebagai tindak lanjut / dukungan dari revisi RTRW Jawa Barat tentang pusat pemerintahan maka perlu dilakukan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pusat pemerintahan Jawa Barat yang saat ini berada di Kota Bandung memiliki beberapa permasalahan antara lain keterbatasan daya dukung Kota Bandung, antisipasi perkembangan wilayah kedepan, dan tuntutan pemerintahan wilayah. Hasil dari pengkajian yang dilakukan oleh dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat memunculkan tiga calon lokasi yang dianggap memenuhi syarat secara regulasi, dan sosial ekonomi, tiga calon lokasi tersebut salah satunya adalah Kecamatan Kertajati yang ada di Kabupaten Majalengka. Kawasan Pusat Pemerintahan Jawa Barat yang baru ini memungkinkan untuk pengkajian dari aspek fisik khususnya kemampuan lahan, kesesuaian lahan, kebutuhan lahan, dan ketersediaan lahan untuk mengetahui apakah Kawasan Kertajati mendukung secara fisik kegiatan yang ada sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat yang baru. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan antara lain kemampuan lahan dengan tahapan *overlay* dan analisis kuantitatif (Pembobotan), kemudian analisis kesesuaian lahan ini untuk menentukan arahan rasio tutupan lahan, arahan ketinggian bangunan, dan kesesuaian antara guna lahan dan fungsi kawasan/pola ruang. Analisis kebutuhan lahan. Kawasan perkantoran pusat pemerintahan menggunakan Permen PUPR no 22 tahun 2018 tentang pembangunan bangunan negara dan Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Dirjen Perhubungan Darat 1998. Sedangkan analisis ketersediaan lahan merupakan analisis gabungan dari hasil analisis dilihat dari kemampuan lahan, ketersediaan kawasan budidaya dan arahan rasio tutupan lahan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan lahan Kecamatan Kertajati didominasi oleh kemampuan kelas d dengan luas sebesar 11.616 Ha atau sebesar 84% dari keseluruhan wilayah kecamatan Kertajati juga didominasi oleh fungsi wilayah yang 99% dari wilayah ini merupakan kawasan budidaya, Kecamatan Kertajati didominasi oleh rasio tutupan lahan maksimal 30% Arahan ketinggian bangunan maksimal 3 lantai. Kebutuhan lahan kebutuhan lahan perkantoran untuk pusat pemerintahan yang baru berkisar 137 Ha secara keseluruhan untuk efisiensi dan estetika ruang maka ada beberapa perkantoran yang dibangun dengan 3 lantai. ketersediaan lahan yang ada pada Kecamatan Kertajati dapat dinilai layak untuk dijadikan pusat pemerintahan baru Jawa Barat.

Kata Kunci: Ketersediaan Lahan, Kebutuhan Lahan, Pusat Pemerintahan

ABSTRACT

Name : Naufal Fawaz Irhamulloh
Study Program : Urban and Regional Planning
Title : The Land Availability for the Civic Center of West Java Province
Counsellor : Ir. Yanti Budiyanitini M.Dev.Plg

As a follow-up / support from the West Java RTRW regarding the Civic Center, it is necessary to move the Civic Center of West Java Province. The Civic Center of West Java government, which is currently located in the city of Bandung, has several problems, including limited carrying capacity of the city of Bandung, anticipation of future regional developments, and demands of regional government. The results of the study conducted by Dinas Perumahan dan Permukiman of West Java revealed three potential locations that were deemed to meet regulatory and socio-economic requirements, one of which was Kertajati District in Kabupaten Majalengka. The new West Java Central Government Area allows for an assessment of the physical aspects, especially land capability, land suitability, land requirements, and land availability to find out whether the Kertajati District physically supports existing activities as the center of the new West Java government. In this research, the methods to be used include land capability with the *overlay* stage and quantitative analysis (weighting), then this land suitability analysis is to determine the direction of land cover ratio, direction of building height, and suitability between land use and area function / money polar. Analysis of land requirements. The central government office area uses Permen PUPR no 22 of 2018 concerning the construction of state buildings and Guidelines for Planning and Operation of Parking Facilities, Director General of Land Transportation 1998. While the analysis of land availability is a combined analysis of the results of the analysis seen from the ability of the land, the availability of cultivation areas and the direction of the cover ratio. land.

The results of this study indicate that the land capability of Kertajati Subdistrict is dominated by the ability of class d with an area of 11.616 Ha or 84% of the total area of Kertajati sub-district which is also dominated by regional functions where 99% of this area is a cultivation area, Kertajati District is dominated by Maximum land cover ratio 30% Direction for maximum building height of 3 floors. The land requirement for offices for the new government center is around 137 Ha. Overall for efficiency and aesthetics of space, there are several offices built with 3 floors. The availability of existing land in Kertajati District can be considered worthy of being the new Civic Center of West Java.

Keywords: Land Availability, Land Requirements, Government Center